

## Sisa Utang Pemerintah Kota Banjarmasin Tertahan di APBD Perubahan



Sumber gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Banjarmasin/o/1719889303670-WhatsApp Image 2024-07-02 at 11.00.05/32uglg4g2ba1hu6.jpeg>

Total utang Pemko Banjarmasin dari sejumlah proyek di tahun 2023 kepada pihak ketiga senilai Rp348 miliar, diklaim telah lunas per 1 Juli 2024. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, saat jumpa pers di kantor Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Senin (1/7/2024) siang.

Ibnu pun merasa bersyukur, karena seluruh anggaran yang terdampak refocusing sebelum akhirnya bisa terbayarkan. Hal ini pun dikatakan Ibnu akan menjadi pembelajaran bagi segenap jajaran di Pemko Banjarmasin, agar dimasa yang akan datang kejadian sama tak terulang lagi.

"Karena memang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Ibnu, saat ditemui RRI Banjarmasin seusai jumpa pers.

Namun demikian, Ibnu membeberkan, masih ada sekitar Rp6,2 miliar sisa uatang yang belum terbayarkan, karena harus menunggu di APBD Perubahan 2024 nanti. Hal ini dikarenakan, mata anggarannya memang baru ada di APBD Perubahan.

"Bukannya tidak bisa terbayarkan. Namun memang harus dibayarkan pada APBD perubahan nanti," ucap Ibnu.

Lebih jauh, Ibnu menekankan, agar kejadian serupa tak terjadi lagi, jajaran SKPD di lingkungan Pemko Kota Banjarmasin pun diminta lebih meningkatkan pengawasan di

internalnya masing-masing. Sehingga jika ada kemungkinan target tidak tercapai, maka di anggaran perubahan harus segera disesuaikan. "Karena di perubahan itu tak hanya bisa menambah kegiatan, tapi juga bisa mengurangi kegiatan hingga anggaran. Dari sini pun angka rasionalisasi APBD tahun 2024 ada di Rp580 miliar," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo menerangkan, sisa utang Rp6,2 miliar yang baru bisa dibayarkan pada APBD perubahan nanti, disebabkan dengan sistem. Karena menurutnya tidak mungkin untuk memunculkan sub kegiatan ditengah APBD Murni yang sedang berjalan.

"Makanya harus di masukan pada APBD Perubahan. Jadi kami minta maaf kepada rekan pihak ketiga kenapa ini jadi terlambat, bukan karena sengaja. Tapi memang kondisi dalam sistem seperti itu," ujarnya. Dirinya pun meminta agar SKPD terkait, yang masih memiliki sisa utang, agar bisa memasukkan usulan pada sub kegiatan di APBD Perubahan nanti. Yakni Dinas Pendidikan sekitar Rp5 miliar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sekitar Rp100 juta serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Banjarmasin sekitar Rp100 juta. "Jadi terisisa 3 dinas ini," ujarnya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa utang Pemko Banjarmasin tersisa Rp6,2 miliar lagi. Rencananya dibayarkan di APBD Perubahan 2024 nanti. Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pun meminta agar SKPD yang sudah melunasi utangnya agar mempercepat pengerjaan proyeknya. Terlebih untuk proyek yang masuk skala prioritas.

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR) Banjarmasin sudah dilelang sejumlah proyek. Dari pembenahan trotoar, akses titian, hingga pembangunan jembatan. "Semuanya sudah berproses di LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik)," kata Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, belum lama ini.

Dia yakin sejumlah program prioritas itu bisa rampung tahun ini. Ambil contoh untuk pembenahan akses titian di kawasan Pulau Bromo, Banjarmasin Selatan. "Pertengahan bulan ini (Juli) insyaallah sudah berkontrak. Anggarannya Rp1,1 miliar," jelasnya.

Tentang pembenahan itu, akses titian yang semula dari material kayu ulin akan dibangun ulang dengan cor beton. Kemudian, titian itu juga bakal dipasang pagar di kedua sisinya. "Nanti juga akan dilengkapi dengan penerangan jalan umum," tambahnya.

Demikian pula dengan pembenahan trotoar berikut drainase di sejumlah kawasan. Salah satunya di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah. "Kecuali untuk proyek pembangunan jembatan, itu mesti bertahap," ungkap Suri. Misalnya, pembangunan jembatan gantung untuk menghubungkan kawasan Sungai Andai dan Cemara Ujung.

Tahun ini, pertama pembebasan lahan yang dilanjutkan pembangunan jalan pendekat dan sebagian struktur utama. "Sisanya dianggarkan lagi di tahun depan," katanya. Dan semua itu, tambah Suri, sudah sesuai arahan wali kota untuk diprioritaskan. "Untuk proyek Jembatan Sungai Lutut-Sungai Jingah dan Jembatan Pramuka-Sungai Gampa juga berproses. Tapi, sementara baru persiapan untuk pengadaan lahan," pungkasnya.

## Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378738/dprd-banjarbaru-target-pembahasan-kua-ppas-2024-rampung-akhir-juli/>, Sisa Utang Pemko Banjarmasin Tertahan di APBD Perubahan, (02/07/2024).
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974830180/sisa-utang-perlahan-lunas-pemko-banjarmasin-ngegas-proyek-prioritas>, Sisa Utang Perlahan Lunas, Pemko Banjarmasin Ngegas Proyek Prioritas, (05/07/2024).

## Catatan:

### Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Laporan realisasi semester pertama menjadi dasar perubahan APBD.
- 2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
  - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - c) keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
  - d) keadaan darurat; dan/atau
  - e) keadaan luar biasa.